

Nomor : B-5554/SJ.2/KP.06.03/06/2025 Jakarta, 5 Juni 2025

Sifat : Biasa

Hal : Sosialisasi terkait Disiplin Pegawai
dan Karir Jabatan Fungsional
di Lingkungan Kementerian Komdigi

Yth.

Daftar Terlampir
di Tempat

Menindaklanjuti masa orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil T.A 2024 maka Biro SDM dan Organisasi akan mengadakan Sosialisasi terkait disiplin pegawai dan terkait Jabatan Fungsional dengan agenda sebagai berikut:

1. Agenda : **Sosialisasi terkait Disiplin Pegawai**
Hari/ Tanggal : Kamis, 12 Juni 2025
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Peserta : 1. CPNS dan PPPK di Lingkungan Kementerian Komdigi
2. CPNS dan PPPK di Lingkungan LPP RRI
3. CPNS dan PPPK di Lingkungan LPP TVRI
Zoom : <https://us06web.zoom.us/j/81565533335>
IDE Rapat : 815 6553 3335

2. Agenda : **Sosialisasi terkait Karir Jabatan Fungsional**
Hari/ Tanggal : Jum'at, 13 Juni 2025
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Peserta : 1. CPNS JF di Lingkungan Kementerian Komdigi
2. CPNS JF di Lingkungan LPP RRI
3. CPNS JF di Lingkungan LPP TVRI
Zoom : <https://us02web.zoom.us/j/87549901908>
ID Rapat : 875 4990 1908

Mengingat pentingnya acara ini, mohon perkenanan Saudara untuk dapat menugaskan pegawai terkait di lingkungan kerja Saudara.

Demikian undangan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro SDM dan Organisasi,



Imam Suwandi

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

LAMPIRAN I

Nomor : B-5554/SJ.2/KP.06.03/06/2025

Tanggal : 5 Juni 2025

DAFTAR UNDANGAN

A. Sekretaris Jenderal

1. Kepala Biro Perencanaan
2. Kepala Biro Keuangan dan BMN
3. Kepala Biro Hukum
4. Kepala Biro Umum
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
6. Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika
7. Kepala Pusat Kelembagaan Internasional
8. Kepala Pusat Kebijakan Strategis
9. Sekretaris Dewan Pers
10. Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia
11. Sekretaris Komisi Informasi Pusat

B. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital

1. Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital
2. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital
3. Direktur Penataan Spekfrekrad, Orbit Satelit dan Standardisasi Infrastruktur Digital
4. Direktur Layanan Infrastruktur Digital
5. Direktur Pengendalian Infrastruktur Digital
6. Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi
7. Kepala Balmon SFR I Jakarta
8. Kepala Balmon SFR I Bandung
9. Kepala Balmon SFR I Denpasar
10. Kepala Balmon SFR I Kupang
11. Kepala Balmon SFR I Makassar
12. Kepala Balmon SFR I Medan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

13. Kepala Balmon SFR I Palembang
14. Kepala Balmon SFR I Pekanbaru
15. Kepala Balmon SFR I Samarinda
16. Kepala Balmon SFR I Semarang
17. Kepala Balmon SFR I Surabaya
18. Kepala Balmon SFR I Tangerang
19. Kepala Balmon SFR I Yogyakarta
20. Kepala Balmon SFR II Banda Aceh
21. Kepala Balmon SFR II Banjarmasin
22. Kepala Balmon SFR II Batam
23. Kepala Balmon SFR II Bengkulu
24. Kepala Balmon SFR II Jambi
25. Kepala Balmon SFR II Jayapura
26. Kepala Balmon SFR II Lampung
27. Kepala Balmon SFR II Manado
28. Kepala Balmon SFR II Mataram
29. Kepala Balmon SFR II Merauke
30. Kepala Balmon SFR II Padang
31. Kepala Balmon SFR II Palangkaraya
32. Kepala Balmon SFR II Palu
33. Kepala Balmon SFR II Pontianak

C. Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital

1. Sekretaris Ditjen Teknologi Pemerintah Digital
2. Direktur Strategi dan Kebijakan Teknologi Pemerintah Digital
3. Direktur Infrastruktur Pemerintah Digital
4. Direktur Aplikasi Pemerintah Digital
5. Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah

D. Direktorat Jenderal Ekosistem Digital

1. Sekretaris Ditjen Ekosistem Digital
2. Plt. Direktur Pengembangan Ekosistem Digital
3. Direktur Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

4. Direktur Pos dan Penyiaran
5. Direktur Layanan Ekosistem Digital
6. Direktur Pengendalian Ekosistem Digital

E. Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital

1. Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital
2. Direktur Strategi dan Kebijakan Pengawasan Ruang Digital
3. Direktur Pengawasan Sertifikasi dan Transaksi Elektronik
4. Direktur Penyidikan Digital
5. Direktur Pengendalian Ruang Digital

F. Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media

1. Sekretaris Ditjen Komunikasi Publik dan Media
2. Direktur Informasi Publik
3. Direktur Komunikasi Publik
4. Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan
5. Plt. Direktur Ekosistem Media
6. Kepala Museum Penerangan
7. Kepala Monumen Pers

G. Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital

1. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital
2. Kepala Pusat Pengembangan Ekosistem SDM Komunikasi dan Digital
3. Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital
4. Kepala Pusat Pengembangan Literasi Digital
5. Kepala Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital
6. Kepala BPSDMP Komdigi Jakarta
7. Kepala BPPTIK Cikarang
8. Kepala Sekolah Tinggi Multi Media
9. Kepala BBPSDMP Makassar
10. Kepala BBPSDMP Medan
11. Kepala BPSDMP Bandung
12. Kepala BPSDMP Banjarmasin

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

13. Kepala BPSDMP Jakarta
14. Kepala BPSDMP Manado
15. Kepala BPSDMP Surabaya
16. Kepala BPSDMP Yogyakarta

H. Inspektorat Jenderal

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Inspektur 1
3. Inspektur 2
4. Inspektur 3
5. Inspektur 4

I. LPP RRI

- Direktur SDM dan Umum LPP RRI

J. LPP TVRI

- Direktur Umum LPP TVRI

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

LAMPIRAN II

Nomor : B-5554/SJ.2/KP.06.03/06/2025

Tanggal : 5 Juni 2025

JADWAL ACARA

Hari/Tanggal	Waktu	Agenda	Keterangan
Kamis, 12 Juni 2025	09.00 – 09.15	PEMBUKAAN	Kepala Biro SDM dan Organisasi
	09.15 – 11.15	Sosialisasi PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai dan Perka BKN No. 7 Tahun 2021 tentang Pemberian Cuti Pegawai	BKN
	11.15 – 12.00	Diskusi	- Panitia - Peserta
	12.00 – 13.00	ISHOMA	
	13.00 – 15.00	Sosialisasi PP 45 Tahun 1983 dan PP 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai	BKN
	15.00 – 15.45	Diskusi	- Panitia - Peserta
	15.45 – 16.00	PENUTUP	Panitia
Jum'at, 13 Juni 2025	09.00 – 09.15	PEMBUKAAN	Kepala Biro SDM dan Organisasi
	09.15 – 11.15	Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023	Kementerian PANRB
	11.15 – 12.00	Diskusi	- Panitia - Peserta
	12.00 – 13.00	ISHOMA	
	13.00 – 15.00	Sosialisasi Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023	BKN
	15.00 – 15.45	Diskusi	- Panitia - Peserta
	15.45 – 16.00	PENUTUP	Panitia

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**